

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Dasar Pemikiran

Pada awal abad ke-20 merupakan masa awal kebangkitan nasional bangsa Indonesia. Salah satunya karena dampak dari politik etis. Politik etis adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumiputera.

Politik Etis secara resmi ditetapkan pada bulan September 1901, ketika Wilhelmina menyampaikan pidato tahunan. Ratu Wilhelmina menuangkan kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program *Trias Van deventer* yang meliputi:

1. Irigasi (pengairan), membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian.
2. Imigrasi yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi.
3. Edukasi yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan.

Salah satu dampak dari diterapkannya politik etis ini adalah adanya pemerataan pada bidang pendidikan. Melalui politik etis, pemerintah Hindia Belanda memberikan kesempatan untuk penduduk bumiputera memperoleh pendidikan. Namun akses untuk memperoleh pendidikan lebih mudah untuk kaum laki-laki, sedangkan untuk kaum perempuan seringkali mendapatkan diskriminasi dan keterbatasan untuk memperoleh pendidikan.

Pemberlakuan politik etis di Hindia Belanda melahirkan sekolah-sekolah bagi kaum pribumi. Bukan hanya sekolah rendah, tetapi dibangun pula sekolah menengah, sekolah keguruan, dan sekolah tinggi. Namun pengajaran di sekolah-sekolah menengah hingga sekolah tinggi hanya diperuntukkan bagi anak laki-laki, sedangkan bagi anak-anak perempuan hanya memperoleh pendidikan di rumah dan di lingkungan keluarga.<sup>1</sup>

Munculnya politik etis, yang salah satu kebijakannya adalah memperluas bidang pendidikan, menimbulkan perubahan di kalangan pribumi terutama perubahan pada kaum perempuan. Penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem diskriminasi. Sistem itu diterapkan bagi masyarakat pribumi untuk mencegah banyaknya orang-orang terpelajar yang dapat mengganggu kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda pendidikan hanya dikhususkan untuk orang-orang Belanda yang berdomisili di Indonesia dan anak-anak bangswawan, sedangkan untuk pendidikan masyarakat umum ataupun anak-anak pribumi baik laki-laki maupun perempuan kurang diperhatikan dengan alasan tidak dibutuhkan.

Kaum perempuan pada masa pemerintahan Hindia Belanda belum mendapatkan hak yang sama dalam bidang politik serta hak pilih. Bahkan, tidak jarang juga kaum perempuan dipaksa untuk menikah pada usia dini. Pada saat itu, perempuan dianggap sebagai makhluk kelas dua, kedudukan perempuan-

---

<sup>1</sup> Suhartono, Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 27.

perempuan Indonesia berada di bawah kedudukan kaum laki-laki. Selain kebijakan pemerintah Hindia Belanda, adat istiadat daerah juga menghalangi kaum perempuan untuk mendapatkan pengajaran atau pendidikan. Anak-anak perempuan banyak yang tidak mendapatkan pendidikan bahkan tidak boleh keluar rumah dan hanya berdiam diri di dalam rumah.

Melihat kondisi perempuan yang mendapatkan diskriminasi, maka timbullah cita-cita kaum perempuan untuk bangkit memperjuangkan haknya untuk mendapatkan pendidikan, yakni melalui kesadaran untuk berorganisasi, dengan cara membentuk organisasi-organisasi perempuan Indonesia. Organisasi-organisasi tersebut bertujuan sama, yaitu memberikan pendidikan bagi kaum perempuan pribumi untuk menjadi pribadi yang cerdas, terampil dan mandiri. Organisasi-organisasi perempuan pada saat itu bersifat umum dan sukarela, artinya bahwa kaum perempuan pada umumnya asal memenuhi syarat umur, kewarganegaraan dan menyetujui tujuan organisasi dapat menjadi anggota atas permintaan sendiri.

Pergerakan wanita yang timbul pada awal masa pergerakan itu masih bersifat perorangan dan kelompok-kelompok tertentu, namun mereka mempunyai tujuan sama yaitu ingin memajukan kerjasama untuk kemajuan wanita khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tujuan yang sederhana itu merupakan suatu langkah maju dalam proses pembaharuan kemasyarakatan yang sebelumnya tidak terlalu memperhatikan peranan wanita. Muncullah gagasan-gagasan yang mengarah pada pembentukan perkumpulan-perkumpulan



Pahlawan wanita yang memperjuangkan hak perempuan Indonesia, memajukan perempuan di Indonesia sehingga yang awalnya perempuan di Indonesia disepelkan dan hanya bertugas di dapur dan mengurus suami bisa ikut memberikan inspirasinya dan sekolah dengan nyaman tanpa adanya larangan yang mengikat.

Salah satu tokoh perempuan yang menyuarakan agar perempuan berhak memperoleh pendidikan yang sama dengan kaum laki-laki, yaitu Maria Josephine Chaterine Maramis atau lebih dikenal dengan Maria Walanda Maramis. Maria Walanda Maramis merupakan salah satu tokoh pergerakan perempuan yang berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara.

Maria Walanda Maramis melihat betapa pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan sebagai pengatur utama rumah tangga. Pada zamannya, tampak jelas dimata Maria Walanda Mramis banyak perempuan Minahasa setelah beranjak dewasa tidak siap menghadapi masa depannya untuk berumah tangga. Apalagi tidak sekolah atau penndidikannya rendah, keadaan yang miskin di desa, dan lain sebagainya. Melihat keadaan kaum perempuan yang seperti itu, Maria Maramis bercita-cita untuk mengangkat kaum perempuan dari keterbelakangan, ketertinggalan dan kebodohan.<sup>2</sup>

Dari latar belakang di atas, penulis mencoba untuk menganalisis lebih dalam mengenai tokoh pergerakan kaum perempuan, Maria Walanda Maramis di

---

<sup>2</sup> Ivan R. B. Maria Walanda Maramis “Jangan Lupakan PIKAT Anak Bungsu”. Manado Sulawesi Utara : Asem (Anggota IKAPI PUSAT)

daerah Minahasa Sulawesi Utara yang dengan penuh perjuangan mengangkat derajat kaum perempuan melalui pendidikan.

## **B. Pembatasan dan Rumusan Masalah**

- **Pembatasan Masalah**

Penelitian ini membahas mengenai Biografi Maria Walanda Maramis: Sejarah Perjuangan dan Perannya Dalam Pendidikan Kaum Perempuan di Minahasa dengan pembatasan waktu dari tahun 1917-1923

- **Rumusan Masalah**

Dari dasar pemikiran tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi bahasan pada bab-bab berikutnya. Adapun rumusan masalah tersebut adalah:

- Bagaimana latar belakang Maria Walanda Maramis?
- Bagaimana pemikiran Maria Walanda Maramis mengenai pendidikan dan hak-hak perempuan di Minahasa?
- Bagaimana peran Maria Walanda Maramis dalam memperjuangkan pendidikan dan hak-hak perempuan di Minahasa?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian**

- **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran Maria Walanda Maramis dalam memperjuangkan pendidikan dan hak-hak perempuan di Minahasa.

- Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan:

- Mempermudah dan dijadikan salah satu bahan bacaan yang berguna bagi para pembaca baik yang berada di lingkungan Universitas Negeri Jakarta maupun bagi pembaca yang berada di luar Universitas Negeri Jakarta.

